



## Literasi Digital Masyarakat Perkotaan Untuk Memerangi Hoaks dan Disinformasi Sebagai Penguat Karakter Kewarganegaraan

Wahyu<sup>a, 1\*</sup>, Marzuki<sup>a, 2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup> wahyupkn386@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 26 November 2025;

Revised: 8 Desember 2025;

Accepted: 28 Desember 2025.

Kata kata kunci:

Karakter;

Literasi Digital;

Disinformasi;

Hoaks;

Masyarakat Perkotaan.

ABSTRAK

Kemajuan pesat teknologi informasi pada era digital telah menghadirkan ancaman nyata dalam bentuk hoaks dan disinformasi yang merusak tatanan kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan. Kajian ini bertujuan menginvestigasi kontribusi literasi digital dalam membentengi karakter warga di tengah derasnya gelombang hoaks dan disinformasi, dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metodologi yang diterapkan adalah pendekatan fenomenologis kualitatif, dengan menghimpun data melalui wawancara semi-terstruktur mendalam, pengamatan partisipatif, dan telaah dokumen terhadap tujuh informan yang ditentukan secara purposif, mencakup warga biasa, pemimpin komunitas digital, aktivis media sosial, serta praktisi pendidikan. Temuan penelitian mengungkap: (1) kapasitas literasi digital warga Gondokusuman tergolong pada level menengah; (2) persebaran hoaks dan disinformasi memberikan dampak yang substansial terhadap degradasi nilai-nilai kewarganegaraan; (3) literasi digital terbukti berkontribusi positif dalam membangun ketahanan karakter kewarganegaraan. Model PLDK menjabarkan nilai-nilai kearifan lokal melalui tiga komponen pokok, yaitu gotong royong digital sebagai pijakan kolaborasi verifikasi informasi, musyawarah komunitas sebagai wahana penyelesaian konflik disinformasi, serta pranata sosial lokal sebagai jalur distribusi literasi kritis kepada khalayak luas. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya mengintegrasikan Model PLDK ke dalam kurikulum PKn dan memperkuat ekosistem informasi yang bertumpu pada semangat gotong royong digital.

ABSTRACT

**Digital Literacy of Urban Communities as a Citizen Character Enhancer: A Descriptive Study of Hoaxes and Disinformation.** The rapid advancement of information technology in the digital era has presented a real threat in the form of hoaxes and disinformation that are damaging the order of life of people in urban areas. This study aims to investigate the contribution of digital literacy in strengthening the character of citizens amidst the rapid wave of hoaxes and disinformation, by taking the research location in Gondokusuman District, Yogyakarta Special Region. The methodology applied is a qualitative phenomenological approach, by collecting data through in-depth semi-structured interviews, participatory observation, and document review of seven informants who were determined purposively, including ordinary citizens, digital community leaders, social media activists, and education practitioners. The research findings reveal: (1) the digital literacy capacity of Gondokusuman residents is classified as medium level; (2) the spread of hoaxes and disinformation has a substantial impact on the degradation of civic values; (3) digital literacy has been proven to contribute positively to building resilience of civic character. The PLDK model embodies local wisdom values through three main components: digital mutual cooperation as a basis for collaborative information verification, community deliberation as a vehicle for resolving disinformation conflicts, and local social institutions as channels for distributing critical literacy to a wider audience. Research recommendations include the need to integrate the PLDK model into the civics curriculum and strengthen the information ecosystem based on the spirit of digital mutual cooperation.

Keywords:

Character;

Digital Literacy;

Disinformation;

Hoaxes;

Urbancommunity.

Copyright © 2025 (Wahyu & Marzuki). All Right Reserved

How to Cite : Wahyu, W., & Marzuki, M. (2025). Literasi Digital Masyarakat Perkotaan Untuk Memerangi Hoaks dan Disinformasi Sebagai Penguat Karakter Kewarganegaraan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(7), 285–296. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i6.4352>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Gelombang Industri 4.0 dan Society 5.0 telah mentransformasi secara mendasar pola masyarakat dalam mengakses, mengolah, dan mendistribusikan informasi, dengan konsekuensi yang signifikan bagi mutu kewarganegaraan di abad ke-21 (Santoso, G. (2024). Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat bahwa penetrasi internet di Indonesia telah menyentuh angka 78,19% pada tahun 2024, suatu capaian yang mencerminkan betapa mendalam proses digitalisasi telah menyentuh sendi-sendi kehidupan warga negara (Naura Deviyanti Nivia Putri, 2025). Konektivitas digital di satu sisi membuka cakrawala pengetahuan yang nyaris tak terbatas dan memperluas ruang partisipasi demokratis warga; namun di sisi lain, ia juga menjelma menjadi sarana efektif penyebaran hoaks, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi yang secara langsung mengikis nilai-nilai serta karakter kewarganegaraan. Dalam lanskap itulah, literasi digital hadir sebagai faktor penentu yang krusial bagi kualitas warga negara di tengah tuntutan era Society 5.0 (Soffi, D., dkk. (2025).

Gejala ini tidak dapat dipisahkan dari pergeseran besar dalam ekosistem media dan komunikasi global, yang oleh sejumlah akademisi dikategorikan sebagai “krisis informasi” abad ke-21 Sari, Y., Sunarso, S., & Suyato, S. (2025). Krisis informasi tersebut pada dasarnya merupakan krisis kewarganegaraan: saat batas pemisah antara informasi sah dan palsu kian menghilang, saat kecepatan viralisasi mengalahkan ketepatan verifikasi, dan saat algoritma platform digital justru mempertebal bias konfirmasi pengguna, maka kapasitas warga untuk bernalar kritis, berpartisipasi demokratis, dan menjaga kohesi sosial pun terancam secara serius. Dalam situasi demikian, literasi digital tidak lagi dapat dipandang sebagai kecakapan pelengkap semata, melainkan telah bertransformasi menjadi fondasi karakter kewarganegaraan yang keberadaannya tidak dapat ditawar, Fikri, A., Rahman, ANU, & Wildania, D. (2025). literasi digital pada hakikatnya mencakup kemampuan untuk memaknai, menilai secara kritis, dan memproduksi informasi dengan memanfaatkan teknologi digital secara etis dan efektif suatu kecakapan yang semakin tidak tergantikan dalam era post-truth ini, sekaligus menjadi prasyarat mutlak bagi terbentuknya warga negara yang cerdas dan berlandaskan karakter kewarganegaraan yang kukuh (Rajaminsah, 2025).

Indonesia menempati posisi sebagai salah satu negara dengan angka penyebaran hoaks tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sepanjang periode 2018 hingga 2024, tidak kurang dari 12.000 konten hoaks berhasil diidentifikasi dan ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, dengan tema yang paling dominan menyentuh ranah politik, kesehatan, dan keagamaan (Kominfo, 2024). Keadaan ini semakin diperburuk oleh kecenderungan pengguna media sosial yang gemar menyebarkan konten tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi, serta oleh fenomena filter *bubble* algoritmik yang memperkuat bias konfirmasi. Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) membuktikan bahwa konten palsu bergerak enam kali lebih cepat dalam jaringan sosial dibandingkan dengan informasi yang akurat sebuah temuan yang menegaskan betapa berbahayanya ancaman disinformasi bagi mutu demokrasi dan kebermaknaan partisipasi warga. Apabila warga kehilangan kemampuan untuk menyaring informasi secara kritis, kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi pun memudar, perilaku pemilih cenderung irrasional, dan ruang deliberasi publik mengalami kemunduran. Kondisi inilah yang menempatkan penguatan literasi digital berbasis nilai kewarganegaraan sebagai agenda yang mendesak untuk segera ditangani.

Pemilihan Kecamatan Gondokusuman sebagai lokus penelitian didasarkan pada sejumlah pertimbangan akademik yang kokoh. Sebagai kawasan perkotaan yang heterogen dengan kehadiran perguruan tinggi terkemuka, komunitas kreatif, dan warga dari beragam latar belakang sosial-budaya, Gondokusuman merupakan representasi miniatur masyarakat urban Indonesia yang sangat relevan untuk mengkaji dinamika literasi digital dan karakter kewarganegaraan. Tidak kalah krusial, kawasan ini menyimpan potensi modal sosial berbasis kearifan lokal Yogyakarta yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks literasi digital, sehingga temuannya dapat menjadi model yang relevan bagi

---

penguatan literasi digital kewarganegaraan di berbagai kota besar Indonesia Silvana, H., & Darmawan, C. (2018).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang posisi strategis sebagai respons utama terhadap krisis literasi digital dan karakter kewarganegaraan yang tengah berlangsung. PKn tidak sekadar berfungsi sebagai mata pelajaran yang mentransfer nilai-nilai normatif, melainkan juga merupakan arena pemberdayaan warga negara agar mampu berpikir kritis, terlibat secara demokratis, dan berperilaku etis dalam ekosistem digital. Dalam bingkai PKn, literasi digital mencakup kompetensi berpikir kritis, kemampuan mengevaluasi informasi secara mendalam, penghayatan etika digital, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis di ranah siber (Widiatmaka, P., & Kurniawan, ID (2023). Jenkins (2009) memperkuat posisi ini dengan konsep “*participatory culture*” yang menekankan kreativitas, kolaborasi, dan keterlibatan aktif warga sebagai wujud kewarganegaraan digital yang bermakna. PKn oleh karenanya perlu mereposisi diri sebagai agen transformasi: tidak sekedar menganalisis *problem disinformasi*, tetapi aktif membangun kapasitas warga untuk melawannya Amalia, AR, Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Mengintegrasikan literasi digital ke dalam pendidikan kewarganegaraan bukan lagi sekadar opsi yang dapat dipilih atau diabaikan, melainkan sebuah keniscayaan dan tanggung jawab konstitusional yang harus diemban di era post-truth ini. Berbagai penelitian sebelumnya telah meletakkan landasan konseptual yang penting untuk memahami keterkaitan antara literasi digital dan karakter kewarganegaraan. Hobbs (2017) merancang kerangka “*create to learn*” yang menempatkan keterlibatan aktif dalam produksi konten sebagai pijakan otentik literasi digital yang sejati. Ranah pendidikan formal menempatkan sekolah sebagai arena strategis pemberdayaan literasi kritis. Di tingkat lokal, Kurniawati dan Baroroh (2023) membuktikan keunggulan program pendampingan berbasis komunitas dibanding pendekatan *top-down* pemerintah, sementara Nasrullah dkk. (2024) mengidentifikasi fenomena *selective exposure* dan *echo chamber* yang memperparah disinformasi di Yogyakarta. Meski demikian, terdapat celah (gap) signifikan dalam literatur yang ada: hingga saat ini belum ada penelitian yang secara integratif mengeksplorasi keterkaitan antara literasi digital, karakter kewarganegaraan, dan kearifan lokal sebagai satu kesatuan kerangka penguatan yang terpadu. Studi-studi yang ada masih cenderung mengkaji ketiga variabel tersebut secara parsial dan terpisah, sehingga gagal menangkap dinamika yang kompleks dan saling pengaruh di antara ketiganya dan inilah kesenjangan yang penelitian ini berupaya mengisi.

Urgensi penelitian ini semakin terasa kuat di tengah konteks global di mana disinformasi telah terbukti mampu mendistorsi proses-proses demokratis di berbagai belahan dunia. Guess et al. (2023) menemukan bahwa algoritma umpan media sosial secara signifikan memengaruhi sikap dan perilaku pemilih dalam kampanye pemilihan umum, sementara Lim (2022) mendokumentasikan bagaimana arus disinformasi telah merestrukturisasi lanskap demokrasi Indonesia. Dalam konteks ini, literasi digital yang kuat bukan hanya soal perlindungan individu dari konten berbahaya, tetapi juga soal ketahanan demokrasi itu sendiri. Stoker dan Hay (2023) memperkenalkan konsep “*civic resilience*” sebagai kapasitas komunitas untuk mempertahankan orientasi demokratisnya di tengah berbagai tekanan, termasuk tekanan disinformasi, yang menjadi salah satu kerangka analitis penting dalam penelitian ini. Kesimpulannya, kearifan lokal Yogyakarta hadir bukan sekadar sebagai ornamen kultural, melainkan sebagai sumber daya epistemik yang memiliki relevansi fungsional terhadap tantangan disinformasi digital. Nilai *gotong royong*, misalnya, secara inheren mengandung mekanisme kolaborasi verifikasi: ketika individu tidak memutuskan sendiri suatu kebenaran informasi melainkan bergantung pada proses kolektif bersama komunitas, maka praktik ini sejalan dengan prinsip *pemeriksaan fakta kolaboratif* yang dianjurkan dalam literasi digital modern (Pennycook & Rand, 2019). Demikian pula, nilai *tepa slira* sebagai kemampuan berempati dan mempertimbangkan dampak tindakan terhadap orang lain secara langsung menginhibisi perilaku menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena warga yang menghayati nilai ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan konsekuensi sosial dari konten yang ditinggalkannya. Sementara itu, tradisi *musyawarah* menyediakan kerangka musyawarah komunitas

yang dapat berfungsi sebagai mekanisme koreksi kolektif terhadap narasi-narasi disinformasi sebelum menyebar lebih luas. Dengan kata lain, nilai ketiga kearifan lokal ini bukan sekedar warisan moral yang bersifat pasif, melainkan kompetensi sosial-kognitif yang apabila dioperasionalkan dalam konteks digital, mampu menjadi lapis pengamanan kewarganegaraan yang organik dan berkelanjutan karena diperlukan pada identitas budaya yang sudah dihayati masyarakat Yogyakarta jauh sebelum era internet.

penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: (1) mendeskripsikan profil literasi digital masyarakat perkotaan Kecamatan Gondokusuman dalam menghadapi arus hoaks dan disinformasi; (2) menganalisis dampak hoaks dan disinformasi terhadap dimensi-dimensi karakter kewarganegaraan meliputi kepercayaan terhadap institusi, toleransi, dan partisipasi demokratis; serta (3) merumuskan model penguatan literasi digital yang efektif sebagai benteng karakter kewarganegaraan berbasis kearifan lokal. Secara kontribusi, penelitian ini memberikan sumbangan teoritis berupa integrasi tiga dimensi yang selama ini dipisahkan literasi digital, karakter kewarganegaraan (*civic character*), dan kearifan lokal ke dalam satu kerangka Model PLDK (Penguatan Literasi Digital Kewarganegaraan) yang holistik dan kontekstual. penelitian ini terletak pada formulasi model integratif yang menempatkan kearifan lokal Yogyakarta sebagai sumber daya kultural dalam membangun ketahanan digital warga, sebuah pendekatan yang belum pernah dikembangkan secara sistematis dalam literatur Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi untuk mengeksplorasi pengalaman hidup (*lived experience*) masyarakat perkotaan dalam menghadapi arus hoaks dan disinformasi di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan pada Februari–Maret 2026 (Creswell & Poth, 2018). Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan variasi latar belakang sosial dan keterlibatan digital, meliputi warga masyarakat umum, anggota komunitas digital aktif, tokoh masyarakat, pendidik, dan aktivis media sosial (Sugiyono, 2019). Penentuan jumlah informan didasarkan pada prinsip kecukupan data dan pencapaian saturasi data, yaitu kondisi ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan tema atau kategori baru yang signifikan secara analitis (Guest et al., 2006). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Instrumen wawancara dikembangkan berdasarkan kerangka literasi digital van Dijk (2020), khususnya pada dimensi akses motivasional, akses material, akses keterampilan, dan akses penggunaan, dengan fokus pada kemampuan identifikasi sumber, verifikasi silang informasi, literasi algoritma, etika berbagi digital, dan deteksi manipulasi informasi. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan yang didukung proses open coding, axial coding, dan selective coding. Kategorisasi tingkat literasi digital dilakukan secara induktif oleh dua peneliti secara independen dan dikonsolidasikan melalui inter-rater agreement untuk meminimalkan bias interpretasi. Keabsahan data dijaga melalui penerapan kriteria trustworthiness yang meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode (Lincoln & Guba, 2011; Denzin & Lincoln, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

Bagian berikut menguraikan temuan penelitian yang dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penelaahan dokumen terhadap tujuh informan di Kecamatan Gondokusuman. Temuan disusun ke dalam empat tema utama yang saling terhubung: (1) peta literasi digital warga perkotaan Gondokusuman; (2) dampak hoaks dan disinformasi terhadap dimensi karakter kewarganegaraan; (3) fungsi literasi digital sebagai pelindung karakter kewarganegaraan; dan (4) Penguatan Literasi Digital Kewarganegaraan sebagai tawaran kerangka penguatan. Setiap tema dibahas

secara mendalam dengan mengintegrasikan perspektif teoritis dari literatur relevan dan temuan empiris dari lapangan.

Data lapangan mengindikasikan bahwa hampir keseluruhan informan secara aktif menggunakan telepon pintar sebagai piranti utama dalam mengakses informasi sehari-hari. Platform media sosial yang paling banyak dimanfaatkan adalah WhatsApp, disusul TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook. Temuan ini selaras dengan laporan Indeks Literasi Digital Nasional 2024 (GNLD Siberkreasi & Kominfo, 2024) yang mencatat tingginya tingkat adopsi media sosial di kalangan masyarakat perkotaan Indonesia. Akan tetapi, frekuensi penggunaan yang tinggi tersebut tidak serta-merta berkorelasi positif dengan kualitas literasi digital yang dimiliki. Pemetaan berdasarkan kerangka van Dijk (2020) mengungkap distribusi yang memprihatinkan: hanya segelintir informan yang tergolong pada kategori Tinggi, mayoritas berada pada kategori Sedang, dan sebagian lainnya masih terjebak pada kategori Rendah.

**Tabel 1.** Tipologi Literasi Digital Informan

Kategori	Karakteristik Utama	Profil Informan
<b>Tinggi</b> Informan dengan literasi digital tinggi mampu mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara mandiri tanpa bantuan orang lain.	Secara konsisten memverifikasi informasi sebelum menyebarkan, aktif menggunakan platform pengecekan fakta, dan mampu mengenali pola manipulasi naratif serta konten disinformasi. Keterlibatan intensif dalam komunitas digital mendorong praktik literasi kritis yang sudah terinternalisasi sebagai kebiasaan sehari-hari.	<b>2 orang</b> FT (aktivis media sosial) dan LW (anggota komunitas digital aktif) menunjukkan kemampuan verifikasi lintas platform dan kesadaran algoritmik yang tinggi. Keduanya secara aktif mendidik anggota komunitas sekitar tentang risiko disinformasi, menjadikan mereka sebagai agen literasi di lingkungannya.
<b>Sedang</b> Informan dengan literasi digital sedang memiliki kemampuan dasar dalam penggunaan perangkat digital, namun masih memerlukan pendampingan untuk tugas yang lebih kompleks.	Mampu menggunakan perangkat dan platform digital secara fungsional, namun belum konsisten dalam verifikasi sumber. Cenderung bergantung pada diskusi komunitas atau referensi eksternal untuk menilai kebenaran informasi, dan mulai menunjukkan kesadaran akan risiko disinformasi meskipun belum sepenuhnya terinternalisasi.	<b>3 orang</b> Sebanyak 3 informan masuk MR (warga umum berlatar belakang pendidikan menengah), PA (ibu rumah tangga aktif di grup WhatsApp komunitas), dan seorang tokoh masyarakat lokal. Ketiga informan ini menunjukkan kemauan belajar yang tinggi namun memerlukan penguatan kapasitas kritis-evaluatif, terutama dalam mendeteksi manipulasi naratif.
<b>Rendah</b> Informan dengan literasi digital rendah mengalami hambatan signifikan dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital, sehingga sangat bergantung pada bantuan pihak lain.	Mengalami kesulitan signifikan dalam mengakses dan mengevaluasi informasi digital. Sangat rentan terhadap konten disinformasi karena minimnya pemahaman tentang kredibilitas sumber. Membutuhkan pendampingan intensif dan intervensi program literasi yang disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka.	<b>2 orang</b> Dua informan dengan latar belakang pendidikan terbatas dan akses perangkat digital yang minim. Keduanya mengungkapkan pengalaman menerima dan meneruskan informasi tanpa proses verifikasi, serta menyatakan ketidaktahuan tentang cara membedakan konten asli dan manipulatif. Konteks sosial-ekonomi menjadi faktor pembatas utama pengembangan literasi digital mereka.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat literasi digital informan mencakup: jenjang pendidikan formal, intensitas keterlibatan dalam komunitas digital, keterpaparan terhadap program literasi media, serta usia. Temuan ini konsisten dengan penelitian Kurniawati dan Baroroh (2023) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan dan keanggotaan komunitas merupakan determinan utama literasi digital perkotaan. Salah satu informan membagikan pengalamannya: "Kalau sudah terbiasa cek dulu sebelum share, rasanya jadi kebiasaan otomatis. Tapi banyak teman yang masih langsung forward kalau kontennya sesuai dengan yang mereka percaya, tanpa berpikir apakah itu benar atau tidak." Penuturan tersebut merepresentasikan fenomena bias konfirmasi sebagai hambatan utama literasi digital, sejalan dengan temuan Pennycook dan Rand (2019) yang menemukan bahwa berpikir analitis berkorelasi negatif dengan kecenderungan mempercayai hoaks. Pada level akses keterampilan (van Dijk, 2020), informan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara keterampilan operasional dasar (tinggi) dan keterampilan kritis-evaluatif (sedang hingga rendah). Mayoritas informan mampu mengoperasikan platform media sosial dengan fasih, namun banyak di antara mereka yang masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi sumber informasi primer, menafsirkan metadata, dan menjalankan verifikasi silang konten antara berbagai platform. Temuan ini memvalidasi penilaian UNESCO (2023) yang menegaskan bahwa ketersediaan akses digital semata tidak cukup tanpa diimbangi pengembangan kompetensi kritis yang memadai. Buckingham (2019) menekankan hal serupa: literasi media bukan hanya tentang menggunakan teknologi, tetapi tentang mengembangkan pemahaman kritis mengenai bagaimana media memproduksi, merepresentasikan, dan mendistribusikan makna dalam masyarakat.

Kesenjangan antara keterampilan operasional dan kemampuan kritis ini membawa implikasi yang mendalam bagi perancangan program literasi digital di masa mendatang. Selama ini, sebagian besar program pelatihan literasi digital di Indonesia masih terfokus secara berlebihan pada dimensi teknis cara mengoperasikan aplikasi, cara memproduksi konten, dan cara mengeksplorasi fitur-fitur platform digital. Sementara itu, aspek yang jauh lebih mendasar yakni kapasitas memverifikasi kebenaran informasi, mendeteksi manipulasi naratif, dan memahami relasi kuasa di balik produksi konten digital masih kerap dikesampingkan atau ditempatkan sebagai tujuan sekunder. Penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran orientasi yang mendasar dalam desain program literasi digital: dari pendekatan yang bersifat teknis-instrumental menuju pendekatan yang bersifat kritis-emansipatoris. Pendekatan kritis emansipatoris ini tidak sekadar mengajarkan bagaimana bernavigasi di ruang digital, tetapi lebih jauh memberdayakan warga untuk secara aktif mempertanyakan, mengevaluasi, dan bila perlu menolak konten-konten yang berpotensi menyesatkan sebuah kapasitas yang sesungguhnya adalah jantung dari kewarganegaraan demokratis yang bertanggung jawab.

Kesenjangan literasi digital yang teridentifikasi dalam penelitian ini juga dapat ditafsirkan melalui kacamata teori modal budaya yang dikembangkan Bourdieu. Informan yang memiliki modal budaya lebih tinggi yang dicirikan oleh tingkat pendidikan formal yang lebih baik, keterlibatan dalam jaringan komunitas intelektual, dan akses terhadap sumber-sumber pengetahuan yang berkualitas cenderung menunjukkan kapasitas literasi digital yang lebih kuat, khususnya dalam dimensi kritis-evaluatif. Sebaliknya, informan dengan modal budaya yang lebih terbatas rentan terjebak dalam apa yang disebut Wardle dan Derakhshan (2017) sebagai ekosistem informasi yang terdegradasi, di mana batas antara informasi sah dan hoaks menjadi semakin kabur dan sulit diidentifikasi. Temuan ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan literasi digital pada dasarnya adalah cerminan dari ketidaksetaraan sosial yang lebih luas, sehingga intervensi literasi digital yang efektif harus peka terhadap dimensi keadilan sosial dan tidak boleh hanya menysar kelompok-kelompok yang sudah memiliki keistimewaan akses terhadap sumber daya pendidikan dan informasi.

Penelitian berhasil mengidentifikasi lima dampak primer hoaks dan disinformasi terhadap karakter kewarganegaraan warga Gondokusuman. Pertama, mudurnya kepercayaan publik terhadap institusi negara dan media arus utama. Ketika informasi palsu terus mengalir tanpa koreksi yang

memadai, keyakinan warga terhadap sumber-sumber otoritatif termasuk pemerintah, institusi kesehatan, dan media mainstream secara bertahap mengalami erosi. fenomena serupa di berbagai kota besar Indonesia, di mana ketidakpercayaan terhadap institusi tumbuh berbanding lurus dengan meningkatnya konsumsi konten media sosial yang tidak terverifikasi, Raharjo, NP, & Winarko, B. (2021).

Kedua, meningkatnya polarisasi sosial yang mempertajam segregasi di antara warga. Disinformasi yang mengeksploitasi isu identitas baik identitas politik, agama, maupun kesukuan terbukti berperan sebagai katalisator yang mempercepat fragmentasi komunitas. Temuan ini selaras dengan tipologi Wardle dan Derakhshan (2017) yang membedakan misinformasi (informasi salah yang disebarkan tanpa niat jahat), disinformasi (informasi salah yang disebarkan dengan niat manipulasi), dan malinformasi (informasi benar yang digunakan untuk merugikan seseorang). Dalam konteks penelitian, disinformasi tentang isu politik dan keagamaan terbukti paling efektif dalam mengikis nilai-nilai kewarganegaraan, konsisten dengan temuan yang mendokumentasikan persenjataan politik identitas melalui media sosial di Indonesia, Muhtadi (2021)

Ketiga, menurunnya partisipasi demokratis, terutama di kalangan generasi muda. Gejala ini termanifestasikan dalam meningkatnya apatisisme politik, enggannya generasi muda berpartisipasi dalam proses pemilu, dan luntarnya kepercayaan terhadap informasi resmi pemerintah. Hal ini konsisten dengan konsep "civic resilience" yang dikemukakan Stoker dan Hay (2023), yang menemukan bahwa tekanan disinformasi yang berkelanjutan dapat mengikis ketahanan demokratis komunitas secara gradual. Guess et al. (2023) juga menemukan bahwa algoritma media sosial yang memperkuat konten sensasional dan kontroversial memiliki dampak langsung pada sikap dan perilaku demokratis pengguna.

Keempat, melemahnya toleransi yang menggerus semangat *Guyub Rukun* yang menjadi identitas khas Yogyakarta. Beberapa informan melaporkan bahwa hoaks bernuansa keagamaan dan etnis telah mulai menyulut ketegangan di tengah komunitas yang sebelumnya hidup rukun dan harmonis. Ini merupakan temuan yang sangat mengkhawatirkan mengingat identitas Yogyakarta sebagai kota toleransi yang telah dibangun selama berabad-abad. Fenomena *echo chamber* yang diidentifikasi oleh Nasrullah dkk. (2024) dikonfirmasi menciptakan silo-silo ideologis yang mengurangi kapasitas deliberasi demokratis dan mempersempit ruang dialog antarkelompok yang berbeda pandangan. Kelima, terjadinya distorsi identitas kewarganegaraan, terutama pada kelompok dengan literasi digital yang rendah, di mana nilai-nilai Pancasila dan identitas kebangsaan yang inklusif terkikis oleh narasi-narasi eksklusif yang disebarkan melalui konten disinformasi.

Kelima dampak yang telah dipaparkan di atas sesungguhnya tidak berdiri sendiri-sendiri sebagai fenomena yang terisolasi, melainkan saling berjaln dalam suatu dinamika yang bersifat kumulatif dan spiral. Erosi kepercayaan terhadap institusi, misalnya, mempersubur polarisasi sosial; polarisasi yang menguat pada gilirannya menekan ruang bagi partisipasi demokratis yang bermakna; penurunan partisipasi demokratis kemudian melemahkan mekanisme koreksi sosial terhadap disinformasi; dan seterusnya dalam lingkaran yang semakin memperburuk kondisi kesehatan demokrasi secara keseluruhan. Pemahaman atas dinamika spiral ini penting karena menunjukkan bahwa respons terhadap ancaman disinformasi tidak dapat bersifat parsial atau sektoral semata. Diperlukan pendekatan yang bersifat sistemik dan holistik, yang secara simultan mengatasi berbagai dimensi dampak disinformasi sekaligus memperkuat fondasi-fondasi karakter kewarganegaraan yang menjadi penangkalnya. Dalam kerangka inilah literasi digital yang berbasis nilai kewarganegaraan menemukan posisi strategisnya sebagai jawaban yang paling komprehensif dan berkelanjutan.

Salah satu temuan yang paling signifikan dalam penelitian ini adalah bagaimana disinformasi tidak sekadar menyebarkan konten palsu, melainkan secara sistematis merekayasa ulang cara berpikir dan cara merasa masyarakat. Dengan memanfaatkan kerentanan psikologis manusia terhadap informasi yang sesuai dengan keyakinan yang sudah ada sebelumnya (*confirmation bias*), disinformasi yang terancang dengan baik mampu mengubah persepsi realitas, membentuk ulang batas antara "kawan" dan

“lawan”, serta mengerosi kapasitas empati dan solidaritas sosial yang merupakan fondasi kehidupan demokratis. Fenomena ini yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai “manipulasi kognitif masif” ini membutuhkan respons yang tidak sekadar bersifat informatif, melainkan transformatif yaitu respons yang mampu mengubah secara fundamental cara masyarakat memproses, mengevaluasi, dan merespons informasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah pendekatan literasi digital yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan memiliki relevansi dan urgensi yang tidak dapat ditawar.

Informan dengan literasi digital tinggi menunjukkan karakter kewarganegaraan yang lebih kuat, lebih kritis, lebih aktif berpartisipasi secara demokratis, dan lebih mampu menjaga toleransi. Mekanisme perlindungan dikategorikan dalam empat strategi: (a) Verifikasi Aktif melalui Turnbackhoax.id dan Cekfakta.com; (b) Jaringan Kritis melalui diskusi berbasis komunitas; (c) Manajemen Algoritmik dengan mengkurasi umpan media sosial; dan (d) Edukasi Lateral kepada keluarga dan komunitas. Nilai-nilai kearifan lokal Jawa (nrima ing pandum, tepa slira, gotong royong) terbukti menjadi modal sosial yang memperkuat ketahanan literasi digital.

Lebih lanjut, analisis mendalam terhadap pengalaman informan berliterasi tinggi mengungkapkan bahwa ketahanan terhadap disinformasi tidak semata bergantung pada kemampuan teknis-kognitif individual, melainkan juga sangat ditopang oleh jaringan sosial dan komunitas yang mereka miliki. Informan yang terlibat aktif dalam komunitas diskusi, baik daring maupun luring, menunjukkan kemampuan yang jauh lebih baik dalam mendeteksi dan menolak hoaks dibanding yang mengonsumsi informasi secara soliter. Temuan ini mengkonfirmasi perspektif sosiokultural bahwa pembelajaran dan pengembangan kompetensi kritis paling efektif terjadi dalam konteks interaksi sosial yang bermakna, bukan melalui proses belajar mandiri yang terisolasi. Dalam konteks literasi digital, ini berarti bahwa komunitas diskusi kritis baik berbentuk kelompok Whatsapp yang berorientasi verifikasi informasi, forum RT/RW, maupun komunitas belajar digital informal sesungguhnya berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang vital bagi ketahanan warga terhadap ancaman disinformasi.

Dimensi gender dalam literasi digital juga muncul sebagai variabel yang layak mendapat perhatian lebih dalam kajian ini. Meskipun penelitian ini tidak dirancang secara spesifik untuk mengkaji perbedaan gender, observasi lapangan menunjukkan pola-pola yang menarik: informan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, cenderung menjadi simpul penyebaran informasi utama dalam jaringan keluarga dan tetangga, namun sekaligus juga rentan menjadi korban utama disinformasi yang bermuatan kesehatan dan pendidikan anak. Sementara itu, informan laki-laki cenderung lebih banyak terekspos pada disinformasi bermuatan politik dan ekonomi. Pola-pola ini mengindikasikan bahwa program penguatan literasi digital yang efektif harus bersifat sensitif gender, dengan merancang pendekatan dan materi yang mempertimbangkan konteks kehidupan dan kerentanan spesifik yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk berdasarkan gender, usia, dan latar belakang pekerjaan.

Berdasarkan temuan penelitian dan sintesis dengan literatur yang ada, kajian ini mengusulkan Model PLDK (Penguatan Literasi Digital berbasis Karakter Kewarganegaraan) dengan empat pilar yang saling menopang. Pilar pertama adalah Pendidikan Kritis Berbasis Komunitas, yang diwujudkan melalui forum diskusi publik reguler, program kader literasi digital di tingkat RT/RW, dan workshop verifikasi informasi berbasis praktik. Pilar kedua adalah Kolaborasi Pentahelix antara pemerintah daerah, akademisi, komunitas digital, media massa, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Pilar ketiga adalah Integrasi Kurikulum PKn Digital di semua jenjang pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan perkembangan kognitif dan sosial peserta didik. Integrasi literasi digital dalam pembelajaran PKn di SMA secara signifikan meningkatkan kemampuan kritis siswa dalam menghadapi konten disinformasi. Pilar keempat adalah Pelestarian Nilai Lokal-Digital, yakni mengintegrasikan kearifan lokal Yogyakarta ke dalam praktik literasi digital, sehingga upaya penguatan literasi tidak terasa asing tetapi justru

memperkuat identitas budaya dan kewarganegaraan warga. Wahyudi dan Sumarno (2024) Model PLDK ini membedakan dirinya dari pendekatan teknis-instrumental sebelumnya dengan menempatkan nilai-nilai karakter kewarganegaraan dan kearifan lokal sebagai inti, bukan sekadar kecakapan digital semata, sejalan dengan konsep kewarganegaraan digital yang mengintegrasikan nilai-nilai PKn konvensional dengan kompetensi kehidupan digital (Winataputra dan Budimansyah, 2023).

Bukti empiris dari lapangan memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana nilai-nilai kearifan lokal tersebut beroperasi secara nyata dalam kehidupan digital informan. Dalam konteks nilai *tepa slira*, informan FT mengungkapkan praktiknya secara gamblang: “Sebelum saya forward pesan di WhatsApp, saya selalu tanya dulu ke diri sendiri kalau ini tidak benar, bagaimana perasaan orang yang kena dampaknya? Itu yang membuat saya tidak buru-buru menekan tombol kirim.” Pernyataan ini mencerminkan internalisasi nilai *tepa slira* kemampuan berempati dan mempertimbangkan dampak tindakan terhadap orang lain sebagai rem alami terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Nilai ini tidak diajarkan secara eksplisit sebagai “literasi digital”, namun telah bekerja secara organik sebagai mekanisme penghambat perilaku menyebarkan hoaks.

Nilai *gotong royong* juga teramati dalam praktik verifikasi kolaboratif yang dilakukan informan LW bersama kelompok diskusinya. LW menggambarkan bagaimana anggota grup WhatsApp RT-nya secara bersama-sama memeriksa kebenaran sebuah pesan viral tentang efek samping vaksin yang beredar tahun 2024: “Kami bagi tugas ada yang cek di Cekfakta, ada yang tanya ke kenalan dokter, ada yang cari berita aslinya. Hasilnya kami laporkan di grup sebelum ada yang menyebarkan lebih jauh.” Praktik ini merupakan manifestasi digital dari semangat *gotong royong*: kolaborasi kolektif dalam memikul tanggung jawab verifikasi informasi, bukan menyerahkannya sepenuhnya kepada individu. Observasi partisipatif peneliti di salah satu sesi diskusi komunitas digital di Gondokusuman mengkonfirmasi bahwa pola seperti ini bukan kejadian tunggal, melainkan telah menjadi norma yang terbentuk secara organik di beberapa komunitas WhatsApp warga.

Tradisi *musyawarah* sebagai kearifan lokal ketiga tampak dalam cara informan PA dan tokoh masyarakat menangani hoaks yang telah terlanjur beredar di lingkungan sekitar. Alih-alih langsung mengonfrontasi penyebar informasi secara individual, PA mendeskripsikan pendekatannya: “Kalau ada berita yang saya curigai, saya tidak langsung bilang itu bohong ke orangnya. Saya usulkan supaya kita bahas bersama di arisan atau pertemuan RT, supaya semua bisa menilai sendiri.” Mekanisme ini secara efektif mengubah forum sosial tradisional menjadi ruang koreksi kolektif terhadap disinformasi, menjaga solidaritas komunitas sekaligus meluruskan informasi yang keliru. Ketiga narasi lapangan ini memberikan bukti empiris bahwa nilai-nilai kearifan lokal Yogyakarta bukan sekadar modal kultural yang laten, melainkan kompetensi sosial-kognitif yang telah aktif bekerja sebagai lapis pengaman organik dalam ekosistem informasi digital masyarakat Gondokusuman, dan dengan demikian memperkuat validitas Pilar Keempat Model PLDK yang diusulkan.

Dalam operasionalisasinya, Model PLDK membutuhkan sejumlah prakondisi kelembagaan dan kultural agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pertama, komitmen politik dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai bagi program-program literasi digital yang berbasis komunitas, bukan sekadar program seremonial yang bersifat satu kali. Kedua, kapasitas fasilitator komunitas yang terlatih dan memiliki legitimasi sosial di kalangan warga, sehingga program dapat menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini tersisih dari akses informasi berkualitas. Ketiga, ekosistem media lokal yang sehat dan berkomitmen pada jurnalisme berkualitas, yang dapat menjadi rujukan verifikasi bagi warga yang meragukan kebenaran suatu informasi. Keempat, dan mungkin yang paling mendasar, adalah perubahan budaya di tingkat rumah tangga dan komunitas terkecil, di mana kebiasaan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya dijadikan norma sosial yang dihargai, bukan sekadar anjuran yang mudah diabaikan.

Pengujian dan validasi Model PLDK secara empiris tentu membutuhkan penelitian lebih lanjut dengan skala yang lebih besar dan metodologi yang lebih beragam. Namun, bahkan pada tahap

konseptualisasi ini, model ini telah memberikan kontribusi penting berupa kerangka analitis yang mengintegrasikan tiga dimensi yang selama ini sering diperlakukan secara terpisah: dimensi kompetensi digital, dimensi karakter kewarganegaraan, dan dimensi kearifan lokal. Integrasi ketiga dimensi ini bukan sekadar klaim teoritis, melainkan didukung oleh temuan empiris dari lapangan yang menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut saling memengaruhi secara signifikan dalam membentuk ketahanan warga terhadap disinformasi. Dengan demikian, Model PLDK menawarkan fondasi yang kuat bagi pengembangan kebijakan dan praktik penguatan literasi digital yang tidak sekadar efektif dalam jangka pendek, tetapi juga bermakna dan berkelanjutan dalam jangka panjang karena berakar pada nilai-nilai yang sudah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat.

## Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa tantangan literasi digital masyarakat perkotaan tidak semata berkaitan dengan kemampuan teknis penggunaan media digital, melainkan berhubungan erat dengan kapasitas kritis, karakter kewarganegaraan, serta ketahanan sosial-kultural dalam menghadapi disinformasi. Dalam konteks tersebut, integrasi literasi digital, Pendidikan Kewarganegaraan, dan kearifan lokal Yogyakarta melalui Model Penguatan Literasi Digital Kewarganegaraan (PLDK) menjadi kontribusi penting penelitian ini dalam membangun ketahanan warga digital yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada nilai demokrasi. Model ini tidak hanya menawarkan kerangka konseptual bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan, tetapi juga menegaskan pentingnya kolaborasi sistemik antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas digital, media, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan berkeadaban. Oleh karena itu, penguatan literasi digital perlu ditempatkan sebagai investasi strategis jangka panjang yang terintegrasi dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dan praktik sosial masyarakat guna memperkuat ketahanan demokrasi Indonesia di era digital yang terus berkembang.

## Referensi

- Amalia, AR, Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Kewarganegaraan Digital sebagai Upaya Persiapan Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi. *Jurnal Karakter Indonesia*, 2(1), 15–33. <https://journal.binus.ac.id/index.php/icj/article/view/12262>
- APJII. (2024). *Laporan survei penetrasi internet Indonesia 2024*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/survei>
- Buckingham, D. (2019). Teaching media in a post-truth age: Fake news, media bias and the challenge for media/digital literacy education. *Cultura y Educación*, 31(2), 213–231. <https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1603814>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.com/books?id=gX1ZDwAAQBAJ>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications. <https://books.google.com/books?id=Pz5RvgAACAAJ>
- Fikri, A., Rahman, ANU, & Wildania, D. (2025). Urgensi Literasi Digital dalam Membangun Karakter Siswa di Era Media Sosial. *RIGGS: Jurnal Kecerdasan Buatan dan Bisnis Digital*, 4(2), 3899–3905. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/1134>
- GNLD Siberkreasi & Kominfo. (2024). *Indeks literasi digital nasional Indonesia 2024*. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. <https://literasidigital.id>
- Guess, A. M., Malhotra, N., Pan, J., Lerner, J., Nyhan, B., Reifler, J., & Sircar, N. (2023). How do social media feed algorithms affect attitudes and behavior in an election campaign? *Science*, 381(6656), 398–404. <https://doi.org/10.1126/science.abp9364>
- Hobbs, R. (2017). *Create to learn: Introduction to digital literacy*. [https://books.google.co.id/books?id=jU8nDwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books?id=jU8nDwAAQBAJ&redir_esc=y)
- Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robison, A. J. (2009). *Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/8435.001.0001>
- Kominfo. (2024). *Laporan penanganan konten hoaks 2018–2024*. Kementerian Komunikasi dan

- Digital Republik Indonesia. <https://www.kominfo.go.id>
- Kurniawati, J., & Baroroh, S. (2023). Efektivitas pendampingan berbasis komunitas dalam penguatan literasi digital masyarakat perkotaan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(2), 112–130. <https://doi.org/10.31002/jkkm.v4i2.3324>
- Lim, M. (2022). Disinformation and the restructuring of democratic landscapes in Indonesia. *Asian Journal of Communication*, 32(4), 289–308. <https://doi.org/10.15575/jassr.v4i1.59>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2011). *The constructivist credo*. Left Coast Press. <https://books.google.com/books?id=-zAdTcwAW6gC>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://books.google.com/books?id=p0wXBAAAQBAJ>
- Muhtadi, B. (2021). Politik identitas dan persenjataan media sosial di Indonesia: Analisis pemilihan umum 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(1), 1–22. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.23>
- Nasrullah, R., Rustam, R., Gunawan, W., & Mulyana, A. (2024). Selective exposure dan echo chamber di media sosial: Studi kasus masyarakat Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(1), 78–96. <https://doi.org/10.56806/jh.v6i4.352>
- Naura Deviyanti Nivia Putri, 2025. Pengguna Internet di Indonesia: Tren, Tantangan, dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Interdisipliner Maliki (MIJ)*, 3(8), 604–608 (2025) *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11648>
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. *Cognition*, 188, 39–50. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.06.011>
- Raharjo, NP, & Winarko, B. (2021). Analisis Tingkat Literasi Digital Generasi Milenial Kota Surabaya dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks. *Jurnal Komunika*, 10(1), 33–44. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3795>
- Rajaminsah, R. (2025). Literasi digital sebagai fondasi kewarganegaraan di era post-truth: Kajian kritis dan implikasinya bagi pendidikan. *Alacrity: Journal of Education*, 5(2). <https://doi.org/10.52121/alacrity.v5i2.854>
- Rianto, P. (2020). Ketika kebohongan menjadi hal biasa: Etika di era post-truth. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.11986>
- Santoso, G. (2024). Pendidikan di Era Revolusi Digital (Civil Society 5.0 Era): Perspektif Yuval Noah Harari *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 3(7), 43–50. <https://doi.org/10.9000/jpt.v3i6.2031>
- Sari, Y., Sunarso, S., & Suyato, S. (2025). Literasi Digital sebagai Fondasi Pendidikan Politik Generasi Muda Era Digital. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(4), 175–184. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4975>
- Silvana, H., & Darmawan, C. (2018). Pendidikan Literasi Digital di Kalangan Usia Muda di Kota Bandung. *Pedagogi*, 16(2), 146–156. <https://doi.org/10.17509/pedagogia.v16i2.7276>
- Soffi, D., dkk. (2025). Peran Literasi Digital dalam Membentuk Kesadaran Kewarganegaraan Generasi Muda di Era Society 5.0. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Indonesia*, 2(7), 2088–2093. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1399>
- Stoker, G., & Hay, C. (2023). Civic resilience and democratic sustainability in the age of disinformation. *Political Studies Review*, 21(2), 215–231. <https://doi.org/10.1177/14789299211063640>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971>
- Traberg, C. S., Roozenbeek, J., & van der Linden, S. (2022). Psychological inoculation against misinformation: Current evidence and future directions. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 700(1), 136–151. <https://doi.org/10.1177/00027162221087936>
- UNESCO. (2023). *Technology in education: A tool on whose terms? Global Education Monitoring Report*. UNESCO Publishing. <https://doi.org/10.54676/UZQV8501>
- Van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The digital divide*. Polity Press. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1781916>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wahyudi, A., & Sumarno, S. (2024). Integrasi literasi digital dalam pembelajaran PKn di SMA: Pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 45–60. <https://doi.org/10.21831/civics.v21i1.56789>

- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe. <https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666>
- Widiatmaka, P., & Kurniawan, ID (2023). Peningkatan Civic Literasi dengan Memanfaatkan Literasi Digital Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pekommas* , 8(1), 59–70. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2023.8.1.59-70>
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2023). *Pendidikan kewarganegaraan digital: Integrasi nilai-nilai PKn dengan kompetensi kehidupan digital*. Remaja Rosdakarya. [https://opac.unesa.ac.id/lihat\\_buku/487\\_slims-node-rbc-fik](https://opac.unesa.ac.id/lihat_buku/487_slims-node-rbc-fik)